

MERDEKA DI ATAS KERTAS?

Independensi BI di Tengah Koordinasi dan Intervensi

Brief Update - Agustus 2026

Center of Macroeconomics and Finance
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

BRIEF UPDATE

MACROECONOMICS & FINANCE ISSUES MONITORING

Merdeka di Atas Kertas?

Independensi BI di Tengah Koordinasi dan Intervensi

Agustus 2026

M. Rizal Taufikurahman

Head of Center MacFin

Abdul Manap Pulungan

Researcher

Sia Nawir

Researcher

Salsabila Azkia Farhani

Researcher

Zulianissa Diah Kusmawati

Research Assistant

Eko Listiyanto

BOD INDEF / Head of Continuum

Riza Annisa Pujarama

Researcher

M. Syamil Iklil Abd Barr

Researcher

Noval Fauzan

Research Assistant

Center of Macroeconomics and Finance (MacFin)

Institute for Development of Economics and Finance



RINGKASAN EKSEKUTIF

Independensi Bank Indonesia kini dipengaruhi oleh tiga perkembangan sekaligus: UU 4/2026 yang memperluas interaksi BI dengan Pemerintah dan DPR melalui evaluasi kinerja (Pasal 9A), kehadiran menteri dalam RDG (Pasal 43), dan pembahasan anggaran (Pasal 60); agenda pertumbuhan Pemerintah; serta transisi kepemimpinan BI sejak 25 Juli. Secara formal, kewenangan BI untuk memilih instrumen moneter tetap berada pada BI.

Ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada Triwulan II, melambat dari 5,61% pada Triwulan I. Inflasi Juli berada di 2,88%, masih dalam sasaran. Di tengah kurs Rp17.994/US\$ per 31 Juli dan yield SBN 10 tahun sebesar 7,29% per 30 Juli, BI-Rate naik secara kumulatif 100 bps sepanjang Triwulan II menjadi 5,75%. Pada saat yang sama, Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) bertambah sekitar Rp4,0 triliun. Stabilisasi dan dukungan kredit ditempuh melalui kanal kebijakan yang berbeda. RDG 18–19 Agustus kembali menahan BI-Rate di 5,75%.

Keterangan Pemerintah atas RAPBN 2027 menetapkan target pertumbuhan 6%, defisit 2,40% PDB, kurs Rp17.500, dan yield SBN 10 tahun sebesar 6,9%, sekaligus menyerukan sinergi fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara yang “semakin solid”. Dorongan untuk menyelaraskan arah kebijakan jelas menguat. Namun, sejauh ini belum terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa pihak di luar BI ikut menentukan instrumen moneter.

Risiko yang perlu dipantau terletak pada proses: bagaimana rekomendasi yang “mengikat” (Pasal 9A) ditafsirkan, sejauh mana BI memiliki ruang untuk memberikan tanggapan formal, dan apakah proses evaluasi dibuka secara memadai. Batas antara koordinasi dan instruksi akan terlihat dari tiga hal: masukan yang diterima BI, tanggapan yang diberikan, dan siapa yang pada akhirnya menentukan instrumen. Independensi bukan isolasi; independensi adalah kapasitas BI untuk menentukan instrumen berdasarkan mandat dan risiko.



Independensi BI: Mandat, Proses, dan Instrumen

Dari Independensi BI ke OJK dan P2SK: Pembagian Peran Antara Otoritas Makin Kompleks

Sejak UU No. 23/1999, BI ditempatkan sebagai bank sentral independen. Pembentukan OJK kemudian memisahkan pengawasan mikroprudensial dari BI, sedangkan P2SK dan revisi 2026 menambah ruang koordinasi dan akuntabilitas. Arsitektur kelembagaan berubah, tetapi kewenangan BI memilih instrumen moneter tetap menjadi titik penting.

Tonggak Hukum	Pasal	Perubahan Utama	Pembagian Peran	Makna Bagi Independensi
1999 – UU 23/1999	Pasal 4 dan 9: BI lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pihak mana pun.	BI ditegaskan sebagai bank sentral yang independen setelah krisis.	BI memegang kebijakan moneter dan tujuan stabilitas nilai rupiah.	Memutus hubungan subordinatif BI dengan keputusan fiskal harian, sehingga independensi menjadi desain hukum.
2004 – UU 3/2004	Pasal 7 dan 58: Sasaran inflasi ditetapkan bersama Pemerintah, laporan berkala kepada DPR.	Kerangka UU BI disempurnakan: mandat, akuntabilitas, dan hubungan kelembagaan diperjelas.	BI tetap memilih instrumen dalam kerangka mandatnya.	Akuntabilitas ditambah tanpa menjadikan evaluasi sebagai resep instrumen.
2011–2013 – UU 21/2011	Pasal 55: Pengawasan bank beralih ke OJK per 31 Desember 2013.	OJK dibentuk, dan fungsi pengawasan perbankan berpindah dari BI ke OJK pada 31 Desember 2013.	OJK menangani mikroprudensial, sedangkan BI moneter dan makroprudensial.	Koordinasi lintas otoritas menjadi kebutuhan permanen. Pembagian tugas bukan subordinasi.
2016 – UU 9/2016	Pasal 4–5: KSSK menjadi forum koordinasi stabilitas sistem keuangan.	Pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan serta kerja KSSK diperkuat.	Otoritas berbagi informasi dan skenario risiko sistemik.	Forum bersama memperkaya data, tetapi tidak otomatis memberi hak veto atas instrumen BI.
2023 – UU 4/2023 P2SK	Pasal 7 (UU BI): Tujuan BI ditambah turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.	Arsitektur sektor keuangan, mandat, koordinasi, dan akuntabilitas diperkuat.	BI–OJK–LPS–Pemerintah bekerja dalam kerangka stabilitas sistem keuangan.	Lebih banyak titik temu harus diimbangi batas kewenangan dan jejak keputusan yang jelas.
2026 – UU 4/2026	Pasal 9A, 43, 60, 60A: Evaluasi DPR, menteri dalam RDG, dan pembahasan anggaran BI.	Interaksi Pemerintah/DPR, evaluasi, dan pengawasan anggaran BI diperluas.	BI tetap menetapkan BI-Rate, SRBI, likuiditas, valas, dan bauran instrumen melalui prosesnya.	Risiko utama bersifat operasional: rekomendasi, tekanan, dan tindak lanjut harus dapat diperiksa.
Kesimpulan formal	–	Kewenangan moneter berada pada BI.	Titik koordinasi dan evaluasi bertambah.	Risiko utama ada pada praktik, bukan pada pemindahan kewenangan secara tertulis.

Kronologi menunjukkan semakin banyak otoritas bekerja di ruang yang sama. OJK mengambil alih pengaturan dan pengawasan perbankan pada 31 Desember 2013, sementara BI tetap memegang kebijakan moneter dan makroprudensial. P2SK memperkuat kerja lintas otoritas, lalu UU 4/2026 menambah titik temu dengan Pemerintah dan DPR. Yang perlu diperhatikan sekarang adalah praktiknya: apakah masukan dan evaluasi membantu BI mengambil keputusan, atau ikut menentukan instrumennya.

Sumber: Bank Indonesia, Sejarah BI, OJK, pengalihan pengawasan perbankan 31 Desember 2013, UU 23/1999, UU 3/2004, UU 9/2016, UU 21/2011, UU 4/2023, UU 4/2026, diolah INDEF.

Penyeimbang Independensi: Transparansi dan Akuntabilitas BI

Independensi bank sentral selalu berpasangan dengan transparansi dan akuntabilitas. Lewat keduanya, publik dapat menilai arah dan alasan kebijakan BI.



Kerangka transparansi BI tergolong kuat untuk hasil kebijakan, tetapi belum menjangkau proses deliberasi. Pada titik inilah perdebatan Pasal 9A perlu diarahkan untuk membuka jejak proses sekaligus menjaga independensi dan memenuhi tuntutan akuntabilitas, tanpa perlu menyentuh pilihan instrumen.

Sumber: UU No. 23/1999, UU No. 3/2004, UU No. 4/2023, UU No. 4/2026, Bank Indonesia, IMF CBT Code Review (2023), diolah INDEF.

Independensi Hukum ≠ Independensi Aktual

Perbedaannya bukan hanya pada bunyi aturan, tetapi pada cara aturan itu dijalankan. Independensi aktual terlihat dari penghormatan terhadap mandat, ruang bagi pejabat untuk berbeda pandangan, dan kebebasan memilih instrumen. Dalam konteks Indonesia, UU 23/1999 menjadi titik balik ketika BI tidak lagi berada di bawah subordinasi keputusan fiskal harian. Perubahan 2026 perlu dilihat dari praktik keputusan, bukan hanya dari bunyi pasalnya.

Tiga Pertanyaan Penentu

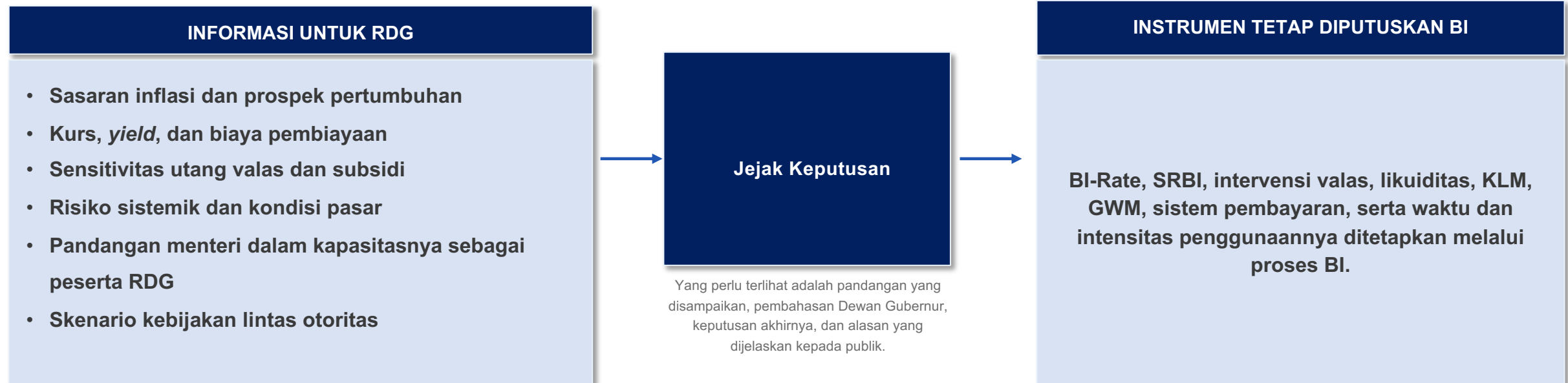
1. MANDAT	2. INSTRUMEN	3. AKUNTABILITAS
Mandat memberi arah, Keputusan tetap di tangan BI Mandat BI mencakup stabilitas rupiah, sistem pembayaran, dan sistem keuangan. Dukungan terhadap pertumbuhan dan lapangan kerja memperluas hal-hal yang perlu dipertimbangkan BI.	Instrumen dan waktu penggunaannya dipilih melalui proses BI. BI-Rate, SRBI, likuiditas, intervensi valas, KLM, GWM, dan sistem pembayaran bekerja melalui kanal berbeda. Masing-masing membawa konsekuensi bagi rupiah, biaya dana, kredit, dan neraca bank.	Akuntabilitas perlu menjelaskan dasar dan pilihan kebijakan. Penjelasan perlu memuat kondisi yang dihadapi, pilihan yang tersedia, alasan memilih instrumen, dan risiko yang dipertimbangkan. Penilaian juga perlu memakai informasi yang tersedia ketika keputusan dibuat, bukan hanya melihat hasil akhirnya.
Apa dasar BI dalam menetapkan prioritas?	Siapa menentukan instrumen, waktu, dan intensitasnya?	Apakah pengawasan memperkuat pertanggungjawaban tanpa mengambil alih keputusan BI?

Sumber: UU No. 23/1999, UU No. 4/2023, UU No. 4/2026, Cukierman, Webb & Neyapti (1992), Dradjad H. Wibowo (2003), analitis INDEF.

Rangkaian keputusan dari awal sampai akhir: dasar hukum, sumber masukan, pembahasan RDG, instrumen yang dipilih, alasan keputusan, dan tindak lanjut. Perubahan rupiah atau yield memberi konteks, sementara catatan proses menjelaskan siapa yang mengambil keputusan.

Menteri Hadir di RDG, Keputusan Tetap Berada di Tangan BI

Pasal 43 memberi menteri ruang untuk menyampaikan pandangan dalam RDG kebijakan umum moneter, tanpa hak suara. Informasi mengenai fiskal, pembiayaan, dan stabilitas sistem keuangan relevan bagi keputusan moneter. Batasnya terlihat dari tindak lanjut: apakah masukan cukup menjadi bahan pertimbangan, atau diterjemahkan menjadi arahan tentang instrumen, waktu, dan intensitas kebijakan BI?



Sumber: UU BI Pasal 43, BI, PTBI 2025 dan arah kebijakan 2026, Presiden RI, instruksi suku bunga PNM Mekaar, diolah dan dianalisis oleh INDEF.

Pernyataan publik yang tersedia menunjukkan dorongan untuk sinergi, bukan instruksi langsung atas pilihan instrumen. Dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 28 November 2025, Presiden Prabowo menekankan pertumbuhan dan stabilitas. BI kemudian mempublikasikan bauran 2026 yang memberi ruang bagi kebijakan pro-growth, KLM, sistem pembayaran, dan pendalaman pasar. Instruksi Presiden agar bunga PNM Mekaar di bawah 9% menyasar program PNM. BI dapat membantu transmisi kredit lewat kebijakan makroprudensial dan koordinasi, tetapi tidak ada indikasi keterkaitan antara instruksi presiden dengan keputusan BI.

Independensi Aktual Terlihat dari Proses Keputusan

Kebijakan yang searah belum menjelaskan bagaimana keputusan dibuat. Hukum memberi titik awal, sedangkan praktik menunjukkan apakah mandat benar-benar dihormati. UU 23/1999 juga relevan: keputusan moneter perlu memiliki jarak dari tujuan politik jangka pendek. Untuk menilai pengaruh, ikuti satu rangkaian keputusan: siapa memberi masukan, melalui forum apa, siapa memilih instrumen, apa yang dicatat, dan bagaimana keputusan dijelaskan.

Pertanyaan Diagnostik		Status	Posisi per Agustus 2026
01	Objek evaluasi: Kinerja kelembagaan atau keputusan instrumen tertentu?	Tersedia	Pasal 9A: evaluasi “berdasarkan laporan kinerja kelembagaan”
02	Dokumen dan indikator apa yang menjadi dasar evaluasi?	Tersedia	Dilaporkan BI setiap triwulan, memuat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
03	Siapa yang melakukan evaluasi?	Tersedia	Alat kelengkapan DPR bidang keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan (Pasal 9A ayat 2)
04	Apa bentuk hasil evaluasi?	Sebagian	Saran perbaikan kinerja kepada BI atau rekomendasi kepada Presiden selaku pihak yang mengangkat Gubernur dan Deputi Gubernur.
05	Apa arti “mengikat” dalam konteks tindak lanjut?	Perlu klarifikasi	Pasal 9A ayat (3): “untuk ditindaklanjuti dan bersifat mengikat”, tetapi lingkup tindak lanjut belum dirinci dalam UU
06	Adakah ruang BI menjelaskan perbedaan pandangan?	Tersedia	Mekanisme laporan dan rapat dengan DPR
07	Apakah proses evaluasi transparan dan dapat diaudit?	Belum tersedia	Pembahasan klasifikasi anggaran kebijakan bersifat tertutup (Penjelasan Pasal 60), dan publikasi proses evaluasi belum diatur

Sumber: Salinan UU No. 4 Tahun 2026, UU No. 4 Tahun 2023, Bank Indonesia, DPR RI, penilaian analitis INDEF.

Kondisi Makro Bergeser: Kejelasan Batas Mandat BI Semakin Penting

Asumsi APBN Berubah, Ruang Respons Kebijakan Ikut Bergeser

Alur dari Asumsi ke Realisasi



Sumber: Kementerian Keuangan, BPS, Bank Indonesia, dan KSSK, analisis INDEF.

Asumsi APBN 2026 dan Realisasi Terkini

Indikator	Asumsi APBN 2026	Realisasi berdasarkan periode	Basis pengukuran & catatan
Pertumbuhan PDB (%)	5,4 (target tahunan)	5,45 (Semester I, c-to-c), 5,29 (Triwulan II, yoy)	Tidak dapat dibandingkan langsung dengan target tahunan, dan belum menunjukkan deviasi negatif.
Inflasi (%)	2,5 (target tahunan)	2,88 (Juli, yoy), 1,65 (YTD Juli)	Masih dalam kisaran sasaran 1,5–3,5%, dengan periode berbeda.
Kurs (Rp/US\$)	16.500 (rata-rata tahunan)	17.994 (31 Jul, KSSK)	Titik akhir periode berada di atas asumsi rata-rata, bukan perbandingan like-for-like (LFL).
Yield SBN 10 th (%)	6,9 (rata-rata)	7,14 (akhir Triwulan II), 7,29 (30 Jul, KSSK)	Rata-rata target vs titik akhir. Tekanan global dan kebutuhan pembiayaan lebih tepat dibaca sebagai faktor penjas awal.

Sumber: Kementerian Keuangan, BPS, Bank Indonesia, dan KSSK, diolah INDEF.

- APBN disusun dari asumsi, sementara kurs, komoditas, suku bunga global, dan arus modal terus bergerak. Perubahan ini menggeser ruang respons kebijakan.
- Bagi Pemerintah, perbedaan asumsi dan realisasi berarti anggaran perlu dibaca ulang. Bagi BI, perubahan tersebut menjadi informasi mengenai inflasi, Rupiah, likuiditas, dan biaya pembiayaan. Ruang koordinasi ada pada pertukaran skenario. Keputusan instrumen tetap mengikuti mandat masing-masing.

Triwulan II Melambat ke 5,29%: Investasi Menguat, Konsumsi Melemah

5,29%

pertumbuhan Triwulan II (yoy)

-32 bps

vs Triwulan I

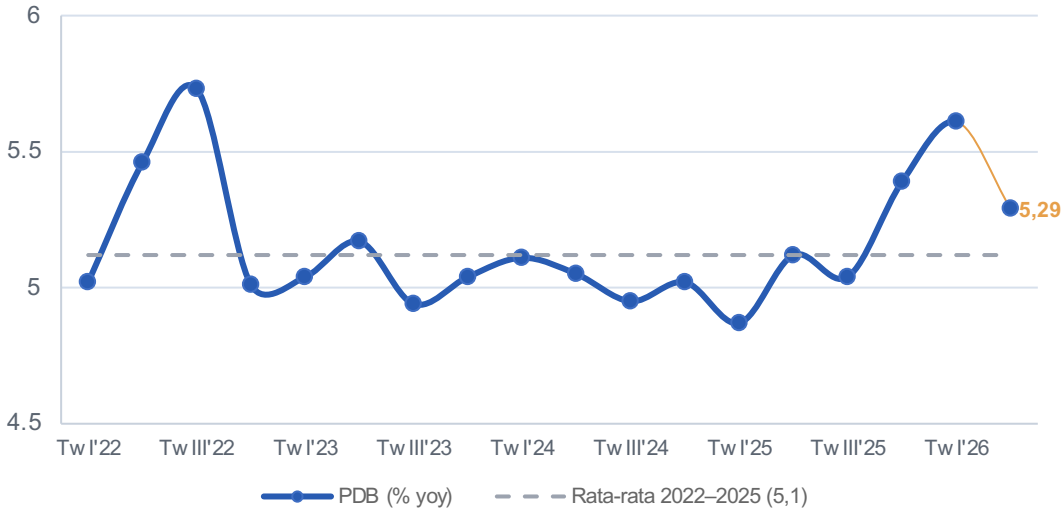
2,88%

inflasi Juli 2026 (yoy)

15,97%

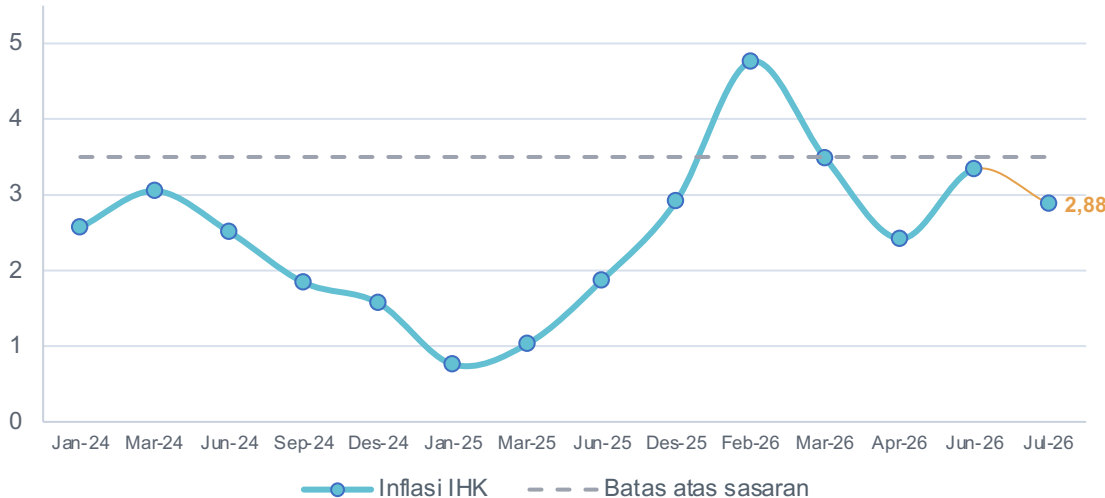
konsumsi pemerintah Triwulan II (yoy)

Pertumbuhan PDB triwulanan, 2022–2026 (% yoy)



Sumber: BPS, diolah INDEF.

Inflasi IHK, 2024–2026 (% yoy)



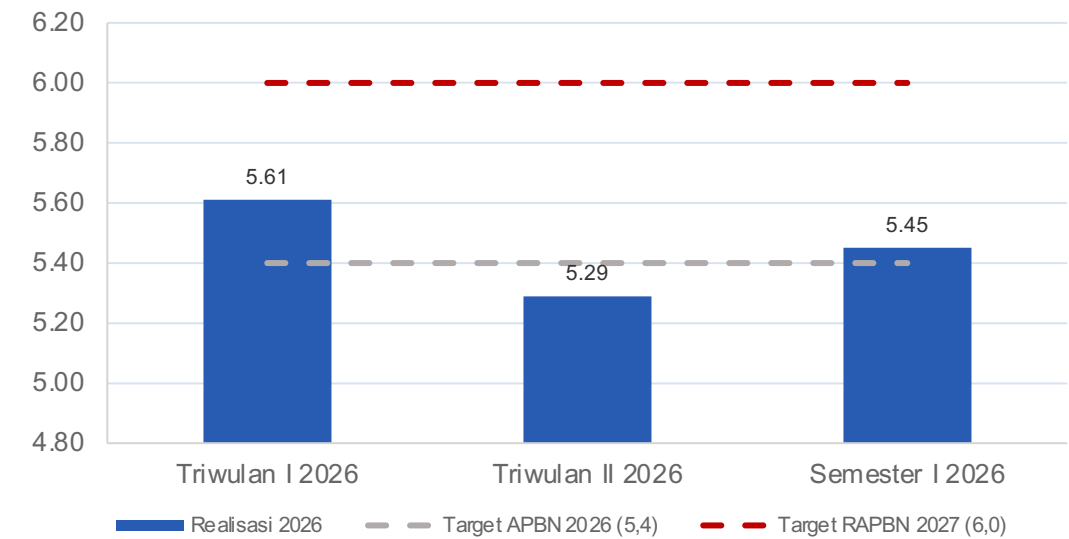
Sumber: BPS, diolah INDEF.

- Triwulan II 2026 tumbuh 5,29% yoy, turun 32 bps dari 5,61% pada Triwulan I. Perlambatan ini belum menunjukkan pelemahan tajam. Permintaan domestik masih menjadi penopang: konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06%, PMTB 6,87%, dan konsumsi pemerintah 15,97%. Net ekspor mengurangi kontribusi 0,78 poin persentase (pp).
- Dibanding Triwulan I, konsumsi melemah dari 5,52% menjadi 5,06%, sementara investasi menguat dari 5,96% menjadi 6,87%. Pertumbuhan Triwulan II lebih banyak ditopang investasi dan belanja pemerintah. Sebagian dorongan berkaitan dengan Idulfitri dan stimulus pada Triwulan I, serta gaji ke-13 dan belanja barang/MBG pada Triwulan II.
- Inflasi Juli 2,88% masih dalam sasaran setelah sempat melampaui batas atas pada awal 2026. RDG 18–19 Agustus menahan BI-Rate di 5,75% setelah menimbang rupiah, yield, arus modal, cadangan devisa, biaya dana, dan penyaluran kredit.

Target 2027 Dipatok 6%, Sementara Momentum Triwulan II Melandai

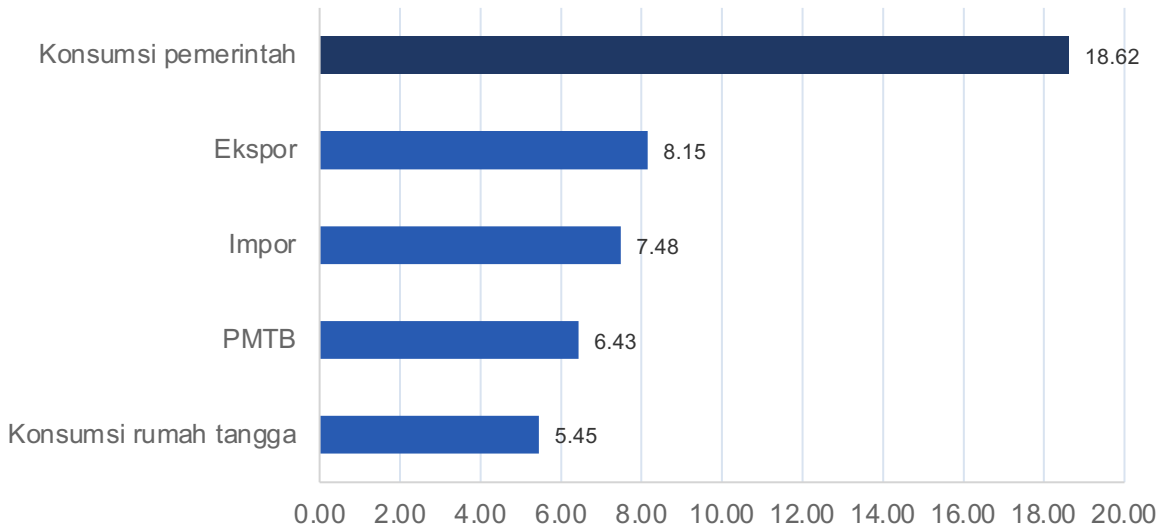
Pidato 14 Agustus 2026 mengubah rentang kesepakatan awal 5,8–6,5% menjadi target titik 6%. Namun, kualitas pertumbuhan akan menentukan pencapaian dan keberlanjutannya.

Pertumbuhan Realisasi vs Target (% yoy)



Sumber: BPS dan KEM-PPKF 2027, diolah INDEF.

Komponen Pengeluaran Semester I 2026 (% yoy)



Sumber: BPS, diolah INDEF.

- Pertumbuhan Triwulan II melandai ke 5,29% dari 5,61%. Pertumbuhan Semester I 5,45% disebut sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun, tetapi klaim tersebut perlu dibaca hati-hati. Secara Semester I, penopang pertumbuhan bergeser: konsumsi pemerintah tumbuh 18,62%, jauh di atas PMTB 6,43% dan ekspor 8,15%.
- Yang perlu dibuktikan bukan sekadar besarnya investasi, tetapi apakah investasi itu menambah kapasitas produksi dan pekerjaan formal, lalu tetap bertahan ketika dorongan belanja pemerintah mereda.
- Bagi BI, target 6% menambah tekanan pro-growth sepanjang 2027. Namun bagi BI, data pertumbuhan hanyalah satu dari banyak pertimbangan, bukan penentu pilihan instrumen.

Moneter dan Keuangan: Bauran, Dilema, dan Transmisi

Bauran BI: Stabilitas dan Dukungan Kredit Berjalan lewat Kanal Berbeda

5,75%

BI-Rate posisi Agustus 2026

+100 bps

kenaikan sepanjang Triwulan II

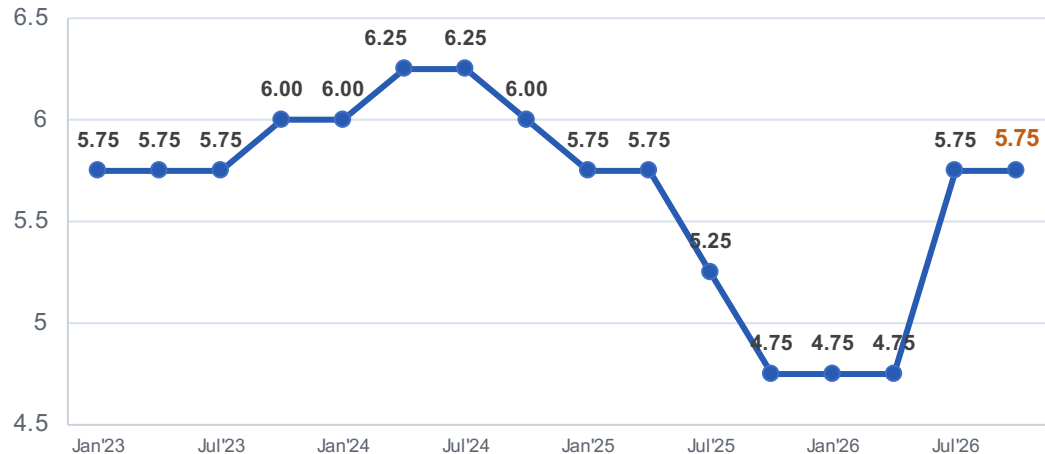
+Rp4,0 triliun

tambahan KLM sepanjang Triwulan II

Rp431,9 triliun

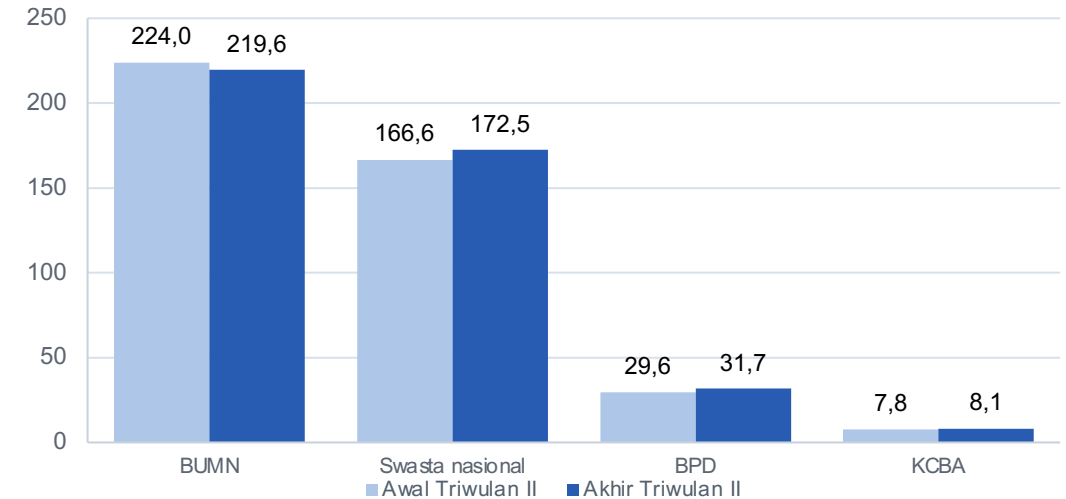
posisi KLM akhir Triwulan II

BI-Rate, Januari 2023–Agustus 2026 (%)



Sumber: Bank Indonesia, diolah INDEF.

KLM menurut kelompok bank sepanjang Triwulan II 2026 (Rp triliun)



Sumber: Bank Indonesia dan OJK, diolah INDEF.

- BI-Rate naik 100 bps dari 4,75% menjadi 5,75% secara kumulatif sepanjang Triwulan II, membalik arah pelonggaran 2025, sementara KLM bertambah sekitar Rp4,0 triliun dari awal hingga akhir Triwulan II. Kenaikan terdiri atas 50 bps pada Mei dan dua kali 25 bps pada Juni. RDG 18–19 Agustus mempertahankan BI-Rate di 5,75% (DF 4,75%, LF 6,50%), sejalan dengan konsensus.
- KLM diarahkan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor prioritas, sejalan dengan mandat baru terkait penciptaan lapangan kerja. Karena dikaitkan dengan penciptaan lapangan kerja, KLM perlu didorong pada sektor-sektor dengan penyerapan tenaga kerja elastis.

SRBI Menjaga Daya Tarik Rupiah dengan Konsekuensi pada Biaya Dana

7,59%

imbal hasil 12 bulan (7 Agu)

40,7 bps

selisih 12 vs 6 bulan

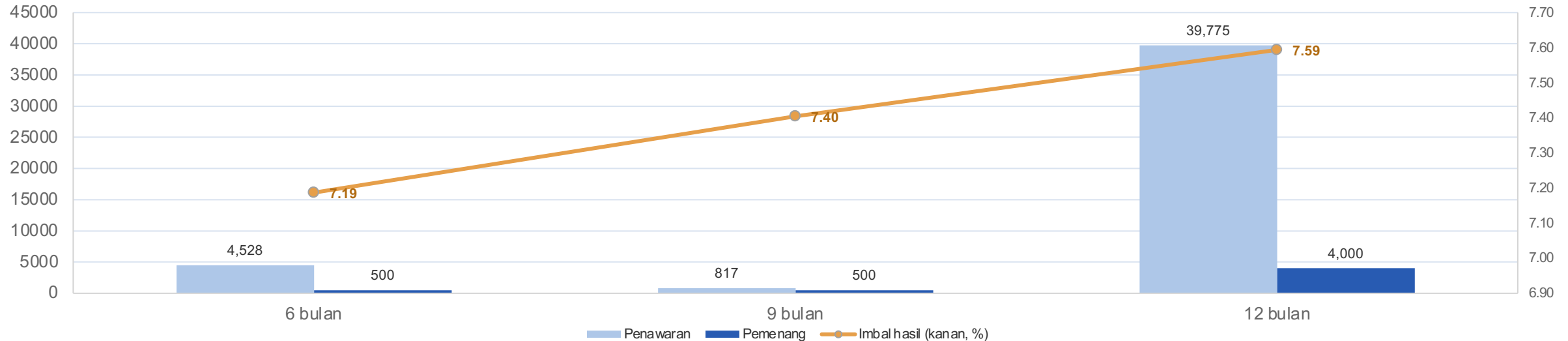
Rp45,12 triliun

total penawaran (7 Agu)

11,1%

rasio penyerapan (7 Agu)

Lelang SRBI 7 Agustus 2026: penawaran dan penyerapan (Rp miliar), imbal hasil (%), skala kanan)



Sumber: Bank Indonesia dan KSSK, diolah INDEF.

- Pada lelang 7 Agustus, imbal hasil tenor 12 bulan sebesar 7,59% berada 40,7 bps di atas tenor 6 bulan sebesar 7,19%. Selisih ini menunjukkan harga untuk durasi dan risiko yang berbeda.
- Penyerapan sekitar Rp5 triliun dari penawaran Rp45,12 triliun, atau 11,1%, dengan penyerapan tenor 12 bulan sekitar 10,1%.
- Imbal hasil SRBI yang lebih menarik dapat membantu menjaga daya tarik aset rupiah, tetapi juga menaikkan biaya dana dan membatasi ruang penurunan bunga kredit.
- Arah kebijakan ke depan adalah menjaga tingkat SRBI agar tidak menambah beban biaya di pasar uang, tetapi tetap menarik arus modal masuk.

Transmisi Suku Bunga Tidak Seragam: Kredit Baru Bergerak Lebih Cepat

+60 bps

deposito 1 bulan (Triwulan II)

+54 bps

kredit baru (Triwulan II)

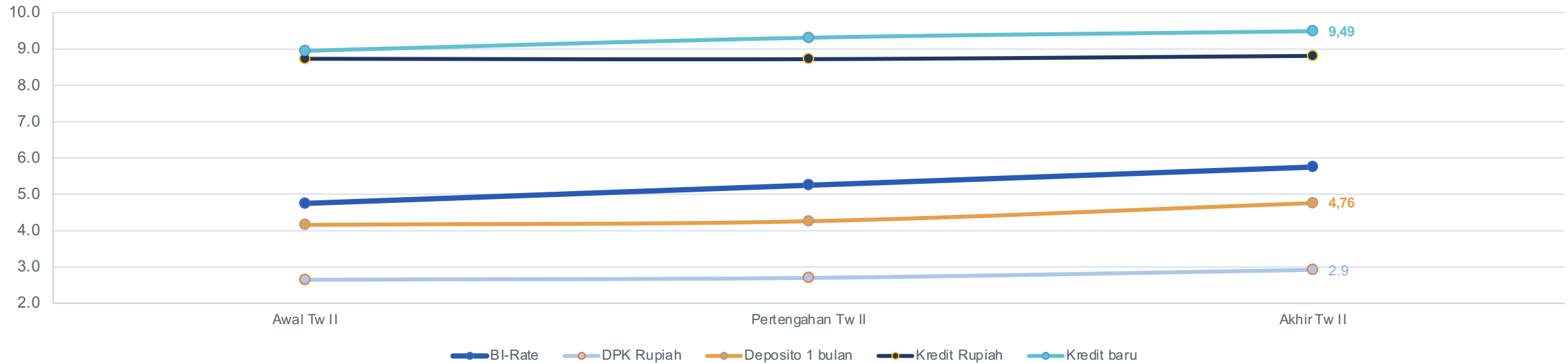
+27 bps

biaya dana DPK (Triwulan II)

+8 bps

kredit berjalan (Triwulan II)

Transmisi BI-Rate ke suku bunga perbankan sepanjang Triwulan II 2026 (%)



Sumber: Bank Indonesia, diolah INDEF.

- Dari awal hingga akhir Triwulan II, BI-Rate naik 100 bps. Suku bunga DPK naik 27 bps, deposito 1 bulan 60 bps, kredit berjalan 8 bps, dan kredit baru 54 bps.
- Kredit baru bergerak lebih cepat karena penyesuaian harga, sementara kontrak lama dan struktur pendanaan menahan perubahan. Jendela tiga bulan memberi sinyal awal, tetapi belum cukup untuk mengukur elastisitas transmisi secara meyakinkan.
- Pilihan kebijakan perlu mengikuti hambatan utamanya, baik biaya dana, risiko debitur, permintaan, maupun kesiapan proyek.

Modal dan Likuiditas Ada, Permintaan Kredit Tetap Menjadi Kunci

23,70%

CAR (akhir Juni)

2,09%

NPL bruto (akhir Juni)

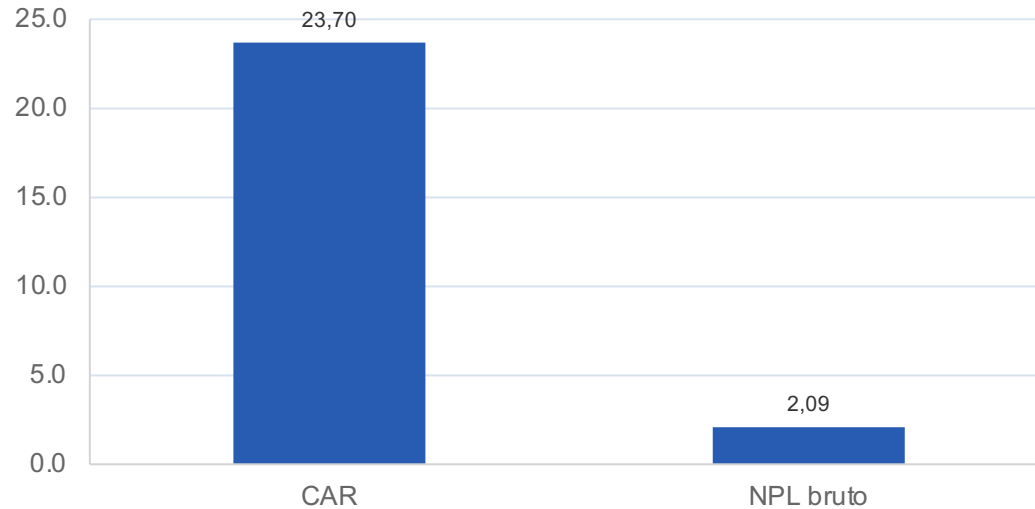
23,1%

AL/DPK (akhir Triwulan II)

21,5%

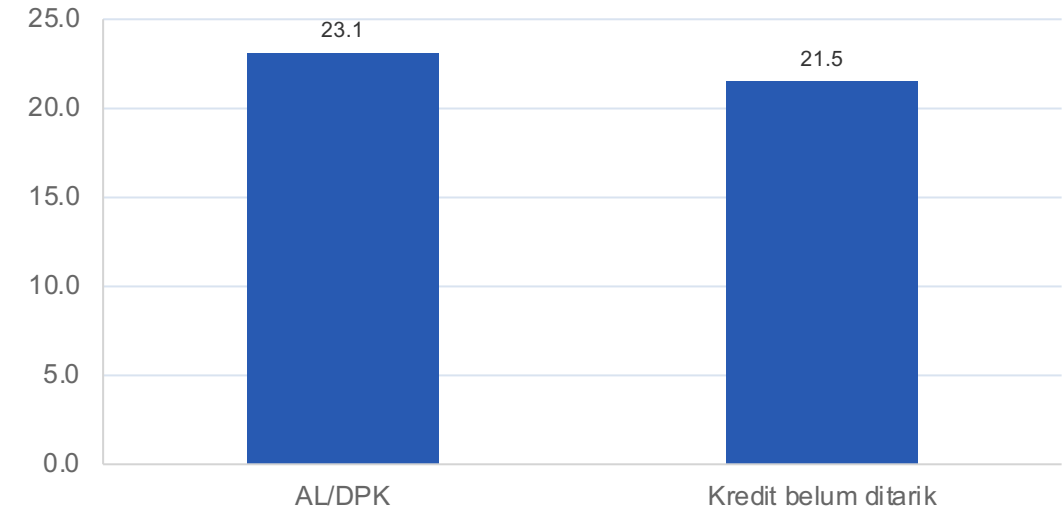
Kredit belum ditarik (akhir Triwulan II)

CAR dan NPL bruto, akhir Juni 2026 (%)



Sumber: OJK, RDKB Juli 2026, diolah INDEF.

AL/DPK dan kredit belum ditarik, akhir Triwulan II 2026 (%)



Sumber: Bank Indonesia dan KSSK, diolah INDEF.

- CAR 23,70% dan NPL bruto 2,09% menunjukkan permodalan dan kualitas aset masih kuat.
- AL/DPK 23,1% dan kredit belum ditarik 21,5% menunjukkan ruang likuiditas dan kapasitas penyaluran masih tersedia.
- Kredit tumbuh 12,67% yoy, lebih cepat daripada DPK 10,21% (total Rp10.281,8 triliun per akhir Triwulan II 2026). Pertanyaan berikutnya adalah kualitas permintaannya: apakah proyek siap dibiayai, debitur mampu membayar, dan ekspansi tetap sehat setelah dukungan berakhir?
- Bagi BI, instrumen terarah lebih tepat ketika hambatan spesifiknya jelas. Menambah likuiditas secara umum belum tentu memperbaiki permintaan dan kualitas kredit.

KLM Memperluas Akses, Dampaknya kepada Debitur Masih Perlu Dilihat

+Rp4,0 triliun

kenaikan KLM sepanjang Triwulan II

Rp219,6 triliun

KLM BUMN (akhir Triwulan II)

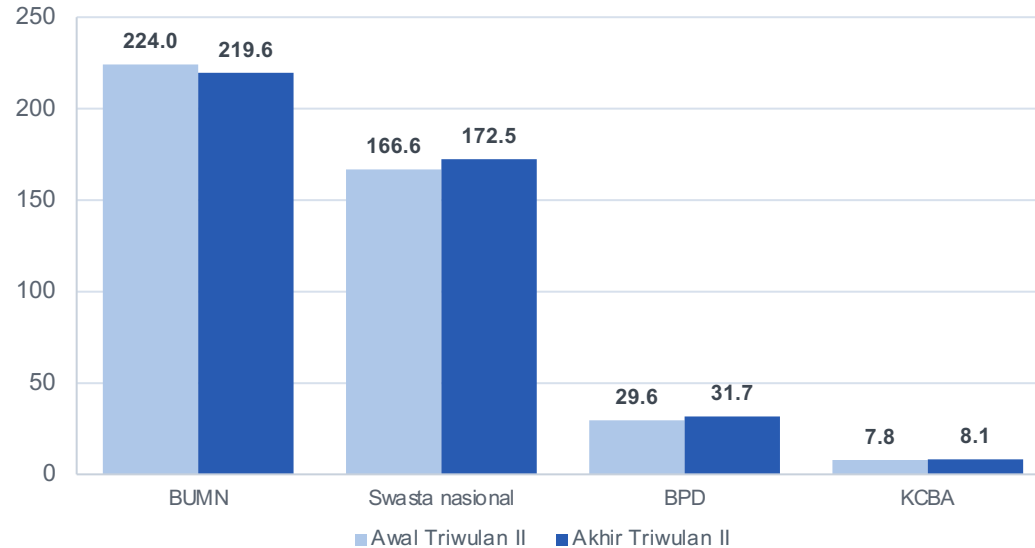
Rp172,5 triliun

KLM swasta nasional (akhir Triwulan II)

8,8%

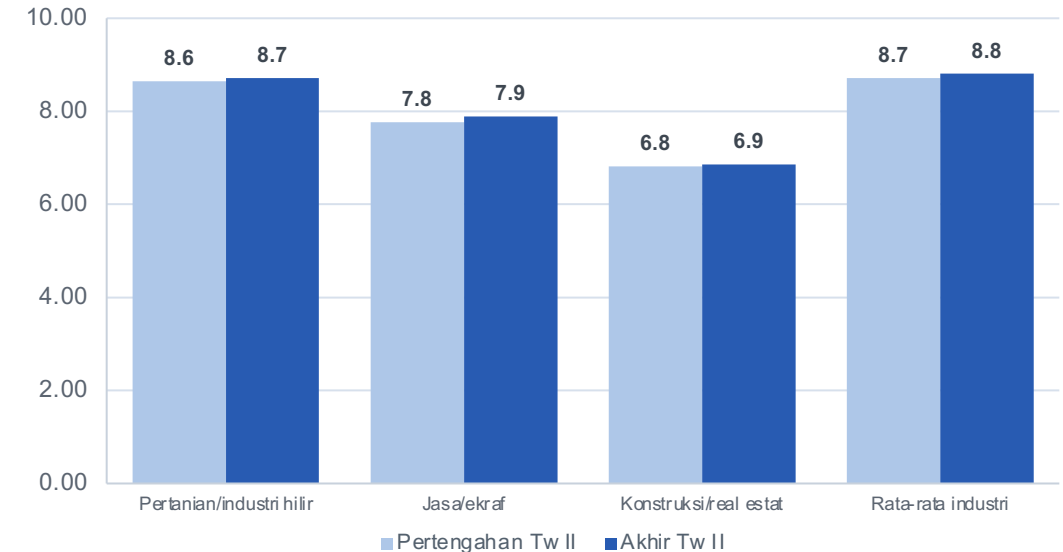
bunga rata-rata industri (akhir Triwulan II)

KLM menurut kelompok bank sepanjang Triwulan II 2026 (Rp triliun)



Sumber: Bank Indonesia, diolah INDEF.

Suku bunga kredit sektor prioritas, Triwulan II 2026 (%)



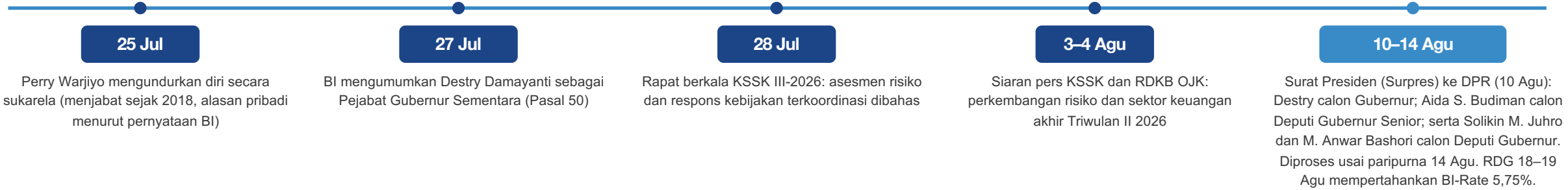
Sumber: Bank Indonesia, diolah INDEF.

- KLM naik Rp4,0 triliun. Kenaikan datang dari BUSN, BPD, dan KCBA, sementara BUMN turun. Pada saat yang sama, suku bunga sektor prioritas naik di seluruh kelompok. Data ini menggambarkan perubahan distribusi fasilitas dan harga, tetapi dampaknya kepada debitur belum terlihat.
- Pembacaan yang lebih lengkap perlu melihat kredit tambahan, manfaat yang diterima debitur, investasi, produksi, lapangan kerja, dan kualitas kredit. Dengan begitu, BI dapat menilai apakah KLM bekerja sebagai insentif yang tepat sasaran atau sekadar memperbesar plafon.

Kelembagaan: Menjaga Ruang Keputusan BI

Masa Transisi Menambah Risiko

Masa transisi menambah risiko. Reaksi rupiah atau yield sesudah pergantian belum cukup untuk membaca perubahan independensi. Dalam kerangka independensi aktual, yang diperiksa adalah kesinambungan RDG, pencatatan keputusan, dan ruang pejabat untuk berbeda pandangan.



FAKTA & DASAR HUKUM Pengunduran diri di tengah masa jabatan merupakan salah satu alasan berakhirnya jabatan menurut Pasal 48 ayat (1) huruf a. Pasal 50 mengatur pejabat Gubernur sementara. Pasal 35E memberi perlindungan hukum bagi tindakan beritikad baik sesuai peraturan.	OBSERVASI PASAR Perubahan rupiah, <i>yield</i> , dan hasil lelang SRBI setelah transisi hanya menjadi konteks. Tanpa jendela peristiwa, pembandingan, dan pengendalian atas guncangan global, harga pasar tidak dapat mengidentifikasi reaksi terhadap pergantian pimpinan.	ANALISIS KELEMBAGAAN Hal penting selama masa transisi: RDG tetap mengambil keputusan, alasan kebijakan tetap dijelaskan, dan pejabat sementara terlindungi ketika bertindak sesuai mandat, termasuk saat pilihannya berbeda dari preferensi Pemerintah.	INTERPRETASI SEMENTARA Kecinambungan institusi bergantung pada kesinambungan prosedur: siapa yang memimpin rapat, bagaimana keputusan dicatat, dan bagaimana alasan kebijakan disampaikan. Harga aset dapat memperkaya konteks, tetapi tidak menggantikan bukti proses.
--	---	---	---

Independensi hukum memberi perlindungan formal sedangkan independensi aktual terlihat ketika pejabat tetap bisa menjalankan mandat, termasuk memilih instrumen yang berbeda dari preferensi Pemerintah, dan keputusan itu terdokumentasi. Aturan formal tidak selalu tercermin dalam praktik. Maka masa transisi perlu dikawal lewat jejak proses keputusan, bukan disimpulkan dari pergerakan rupiah atau yield semata.

Sumber: Bank Indonesia (pengumuman resmi Jul 2026), Salinan UU No. 4 Tahun 2026 (Pasal 35E, 48, 50), KSSK, DPR RI, hasil lelang SRBI BI, diolah INDEF.

Akuntabilitas Kredibel Memerlukan Ruang untuk Berbeda Pandangan

Evaluasi tetap perlu, tetapi tidak boleh menetapkan hasil instrumen sejak awal. Masukan dan proses RDG dicatat, dan BI menjelaskan pilihan serta *konsekuensi kebijakan*. “Mengikat” berarti wajib memberi jawaban dalam kewenangan masing-masing, bukan mengikuti preferensi.

PENGAMAN (SAFEGUARDS) AGAR KOORDINASI TIDAK BERUBAH MENJADI INSTRUKSI

1. Tetapkan objek dan indikator evaluasi.
2. Catat masukan, perbedaan pandangan, dan proses RDG.
3. Pisahkan evaluasi kelembagaan dari penilaian personal.
4. Pastikan BI menjelaskan alasan keputusan, termasuk ketika berbeda pandangan.
5. Publikasikan tindak lanjut tanpa mengarahkan instrumen.

1. Objek evaluasi
Evaluasi menilai mandat, indikator, kinerja kelembagaan, dan proses, bukan target jangka pendek atau penilaian personal pejabat BI.

2. Proses keputusan
Masukan Pemerintah, perbedaan pandangan, pilihan instrumen, dan alasan RDG perlu dicatat agar pengawasan dapat memeriksa proses tanpa mengambil alih keputusan.

3. Ruang respons
“Mengikat” perlu diterjemahkan sebagai kewajiban memberi tanggapan dan menindaklanjuti dalam ruang kewenangan masing-masing. BI tetap memerlukan ruang formal untuk menjelaskan perbedaan pandangan tanpa menjadikan evaluasi sebagai instruksi operasional.

Safeguards	Bentuk Operasional	Aktor dan Kanal
Objek dan indikator evaluasi	Lingkup evaluasi Pasal 9A dirinci dalam tata tertib alat kelengkapan DPR: indikator kinerja kelembagaan, bukan level atau arah instrumen	DPR (AKD bidang keuangan)
Catatan proses RDG	Ringkasan pertimbangan RDG dipublikasikan dengan jeda waktu, memuat masukan menteri (Pasal 43) dan perbedaan pandangan	BI (Peraturan Dewan Gubernur)
Evaluasi kelembagaan, bukan personal	Laporan triwulanan Pasal 9A memakai format indikator kinerja utama yang baku, dan rekomendasi tidak menilai pejabat secara personal	BI–DPR (format laporan yang disepakati)
Hak jawab formal BI	Tanggapan tertulis BI atas rekomendasi DPR dilampirkan sebelum rekomendasi diteruskan kepada Presiden	DPR–BI (mekanisme tanggapan tertulis)
Publikasi tindak lanjut	Rekomendasi, tanggapan BI, dan status tindak lanjut dipublikasikan berkala, sementara pembahasan anggaran tertutup (Pasal 60) diberi ringkasan terbuka	DPR dan BI (situs resmi, berkala)

Sumber: Kerangka analitis INDEF, Salinan UU No. 4 Tahun 2026, BIS, IMF, diolah INDEF.

Tiga Skenario: Apa yang Terlihat dari Jejak Keputusan

Pembeda ketiga skenario ada pada empat jejaknya: catatan masukan, pilihan instrumen, perbedaan pandangan, dan alasan keputusan.

A. Potensi Koordinasi Kredibel

Informasi lintas otoritas dipertukarkan. Perbedaan pandangan dicatat. RDG memilih instrumen dan menjelaskan alasannya. Evaluasi menilai mandat serta proses.

Cirinya: proses dapat ditelusuri dan diaudit. Pasar tetap dapat bergejolak tanpa langsung menunjukkan masalah independensi.

INDIKATOR DIPANTAU (6–12 BULAN)

- Ringkasan pertimbangan RDG diterbitkan rutin dan memuat perbedaan pandangan
- Tanggapan tertulis BI atas rekomendasi DPR tersedia untuk publik
- Bauran (BI-Rate, SRBI, KLM) dijelaskan per kanal beserta konsekuensinya

B. Potensi Tekanan Operasional

Tekanan operasional terjadi ketika pihak luar mulai menentukan BI-Rate, SRBI, waktu kebijakan, intervensi, atau pembelian SBN. Evaluasi dan anggaran dapat digunakan untuk menekan pejabat.

Indikasinya perlu datang dari dokumen, komunikasi, atau keputusan yang dapat ditelusuri. Pergerakan harga saja belum cukup.

INDIKATOR DIPANTAU (6–12 BULAN)

- Rekomendasi DPR/Pemerintah menyebut level atau arah instrumen tertentu
- Pembahasan anggaran (Pasal 60) dikaitkan dengan arah kebijakan moneter
- Tekanan atau pergantian pejabat menyusul perbedaan pandangan yang tercatat

C. Potensi Koordinasi Tidak Efektif

Koordinasi yang lemah terlihat ketika asumsi tidak selaras, rekomendasi tidak jelas, kebijakan saling meniadakan, atau transmisi ke sektor riil tersendat. Kondisi ini masih berbeda dari instruksi langsung.

Cirinya: kebijakan mudah berubah dan transmisi melemah. Kondisi tersebut dapat muncul dari koordinasi yang buruk tanpa berarti independensi telah dilanggar.

INDIKATOR DIPANTAU (6–12 BULAN)

- Asumsi APBN dan proyeksi BI divergen tanpa forum rekonsiliasi
- Arah kebijakan berubah antar-RDG tanpa data baru yang dijelaskan
- Transmisi tersendat: selisih antara biaya dana dan bunga kredit terus melebar

Sumber: Kerangka analitis INDEF, Salinan UU No. 4 Tahun 2026, BIS, IMF, diolah INDEF.

Update Fiskal: **Dukungan, Pembiayaan, dan Tekanan Pasar**

Indikator Fiskal Membaik, Kebutuhan Pembiayaan Tetap Tinggi

+21,4%

pendapatan Semester I 2026 (yoy)

+17,8%

belanja Semester I 2026 (yoy)

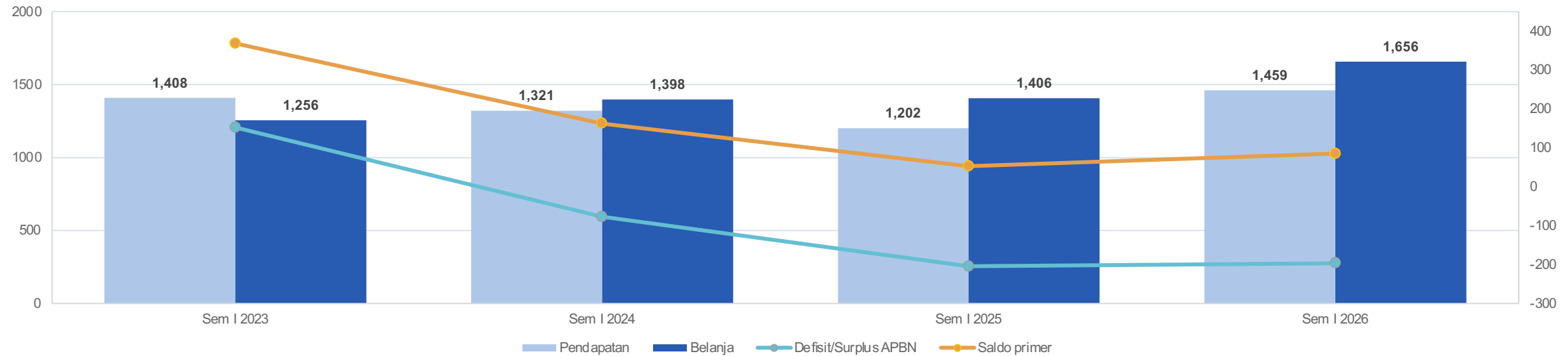
Rp85,1 triliun

surplus primer Semester I 2026

0,76% PDB

defisit Semester I 2026

Pendapatan dan belanja (batang, skala kiri) dan defisit serta saldo primer (garis, skala kanan), Semester I 2023–2026, Rp triliun



Sumber: Kementerian Keuangan (APBN KiTa 2023, 2024, dan 2026), diolah INDEF.

- Empat tahun terakhir menunjukkan arah yang jelas: pendapatan Semester I baru kembali melampaui level 2023 pada 2026, sementara belanja terus menanjak. Posisi APBN berbalik dari surplus Rp152,3 triliun (2023) menjadi defisit sekitar Rp200 triliun. Surplus primer dan defisit yang lebih rendah memberi bantalan fiskal. Kebutuhan penerbitan dan pembayaran utang tetap membuat pasar memperhatikan jumlah bruto, jatuh tempo, komposisi instrumen, dan kredibilitas kebijakan.
- Informasi fiskal membantu BI membaca tekanan pasar, rupiah, dan likuiditas. Pada saat yang sama, kebutuhan menjaga biaya utang tetap rendah tidak dapat menjadi sasaran tersendiri bagi instrumen moneter.

Pembiayaan Pemerintah Menjadi Informasi bagi BI

57,4%

realisasi utang neto (s.d. akhir Triwulan II)

62,7%

realisasi SBN (s.d. akhir Triwulan II)

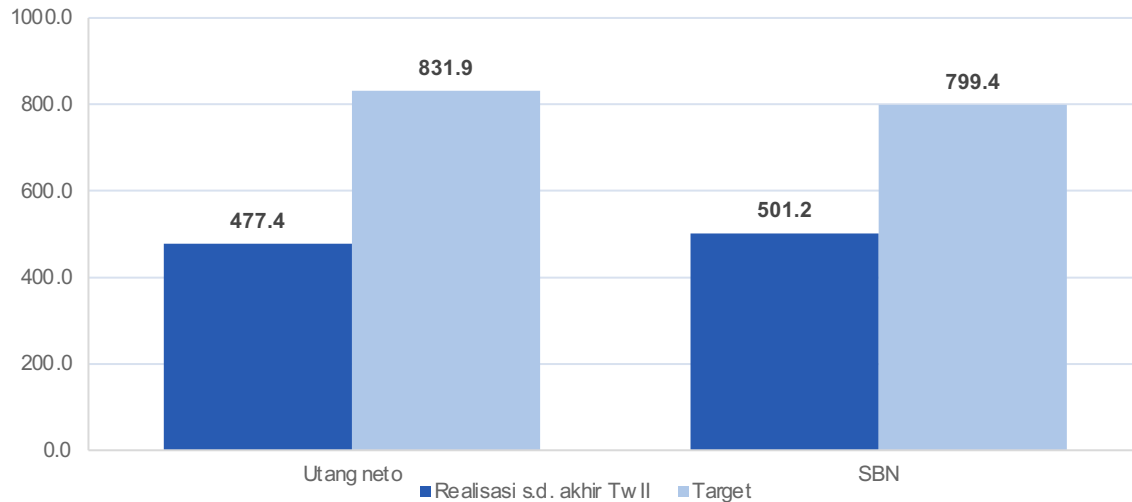
1,8 kali

bid-to-cover SUN (s.d. Triwulan II)

2,5 kali

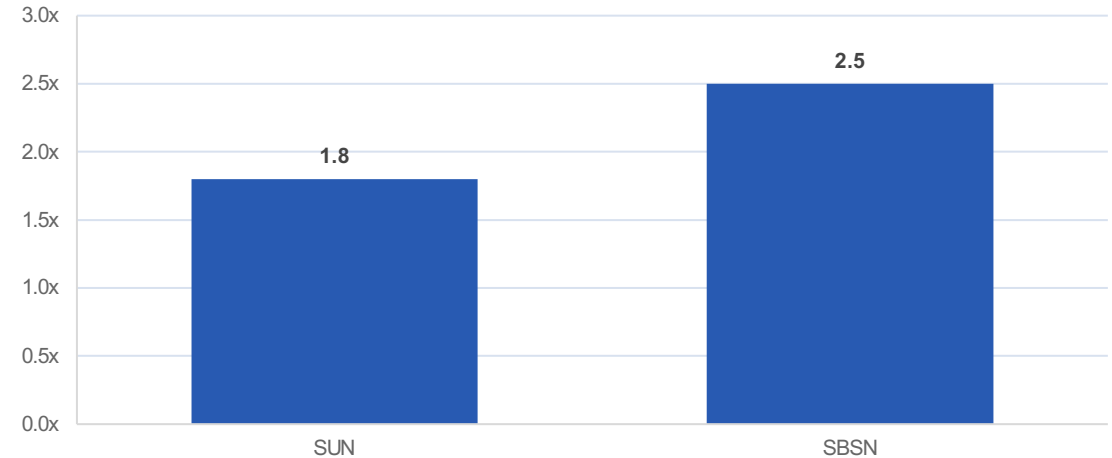
bid-to-cover SBSN (s.d. Triwulan II)

Realisasi dan target pembiayaan, s.d. akhir Triwulan II 2026 (Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan, diolah INDEF.

Bid-to-cover lelang, s.d. akhir Triwulan II 2026 (kali)



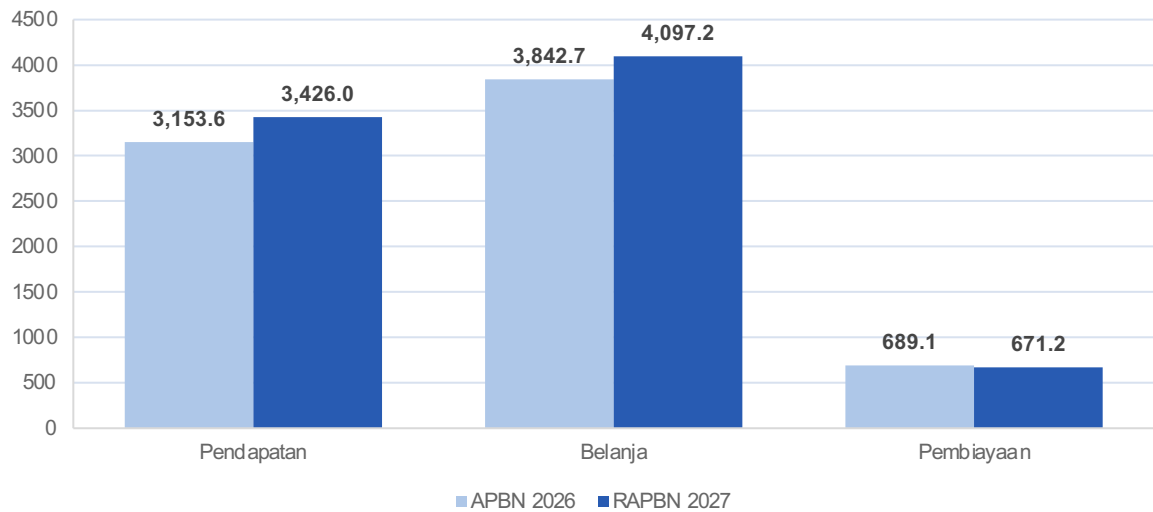
Sumber: Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, diolah INDEF.

- Realisasi utang neto sekitar 57,4% target (s.d. akhir Triwulan II) dan SBN sekitar 62,7% target membuat jadwal penerbitan penting bagi pasar dan BI. Rasio *bid-to-cover* SUN 1,8 kali dan SBSN 2,5 kali menunjukkan perbandingan antara penawaran dan jumlah yang dimenangkan. Angka itu belum menggambarkan seluruh biaya dana.
- Data pembiayaan dibaca bersama yield, tenor, arus modal, likuiditas, dan kondisi global. Pasar yang bergerak searah dengan kebutuhan fiskal belum cukup untuk menyimpulkan adanya arahan.

RAPBN 2027: Belanja Naik 6,6%, Defisit Dirancang Turun ke 2,40% PDB

Asumsi kurs relatif dekat dengan realisasi, sedangkan asumsi yield masih berada di bawah posisi pasar.

Postur 2026 vs 2027 (Rp triliun)



Sumber: Kemenkeu, BPS, BI, dan KSSK, diolah INDEF.

Asumsi Dasar 2027 dan Realisasi Terkini

Indikator	RAPBN 2027	Realisasi terbaru	APBN 2026
Pertumbuhan (%)	6,0	5,45 (Semester I, c-to-c)	5,4
Inflasi (%)	2,5	2,88 (Juli, yoy)	2,5
Kurs (Rp/US\$)	17.500	17.197 (rata-rata Semester I)	16.500
Yield SBN 10 th (%)	6,9	6,57 (23 Juni)	6,9

- Asumsi kurs naik Rp1.000 dari APBN 2026 dan berada di dalam kisaran pergerakan tahun berjalan. Per 18 Agustus, rupiah menguat ke Rp17.862/US\$.
- Asumsi yield 6,9% setara level awal tahun, sedangkan sejak pertengahan tahun yield bertahan di atas 7% (7,29% pada 30 Juli), sehingga pemerintah berasumsi biaya pembiayaan akan turun.
- Asumsi inflasi 2,5% persis di titik tengah sasaran BI 2,5% ± 1%.

Sumber: Pidato Presiden 14 Agustus 2026; APBN KiTa Juli 2026; BPS; BI; KSSK, diolah INDEF.

Defisit: 2,68% PDB (2026) → 2,40% PDB (2027), dengan asumsi PDB Rp27.987 triliun

- Menurut pidato Presiden pada 14 Agustus 2026, hingga akhir Juli 2026 pendapatan negara tumbuh 21,3% dan belanja negara 18,2%, sementara defisit mencapai 0,91% PDB.
- Namun, kenaikan pendapatan tersebut sebagian dipengaruhi oleh tertundanya restitusi pajak, sehingga pertumbuhan penerimaan belum sepenuhnya mencerminkan penguatan basis pendapatan negara.
- Kombinasi target pertumbuhan 6% dan asumsi yield 6,9% menyiratkan ekspektasi penurunan biaya dana. Bagi BI, ekspektasi ini adalah informasi. BI-Rate, SRBI, dan likuiditas tetap ditentukan dari proses RDG.

Sinergi Makin Luas, Batas Kewenangan Tiap Otoritas Harus Jelas

Pidato RAPBN memperluas ruang koordinasi tanpa menyentuh instrumen. Yang harus dijaga: ruang keputusan tiap otoritas di dalam arah bersama tersebut.

“Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara harus bekerja sinergis dan semakin solid”

(Pidato RAPBN 2027, 14 Agustus 2026)

PEMERINTAH – FISKAL	BANK INDONESIA – MONETER	OJK – SEKTOR KEUANGAN	DANANTARA
• Belanja Rp4.097,2 triliun, defisit 2,40% PDB • 8 Program Kerja Prioritas Nasional • Konsolidasi pengadaan: LKPP menjadi Badan Pengadaan (potensi ±Rp360 triliun)	• BI-Rate 5,75%, SRBI, likuiditas, dan valas • Insentif KLM yang diperoleh bank mencapai Rp431,9 triliun; sektor prioritas didorong melalui kanal KLM • Instrumen dan waktunya tetap dipilih melalui proses RDG	• Bursa Mineral dan Komoditas Strategis: mulai beroperasi 1 Januari 2027, diawasi OJK • Demutualisasi bursa, free float 7,5% → 15% • Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII): Jakarta dan Bali	• DDMF (Danantara Development Management Fund): proyek lintas generasi (Giant Sea Wall, mobil/motor nasional) • Devisa ekspor: US\$14 miliar dalam dua bulan pertama • Optimalisasi aset dan dividen BUMN

MENJAGA INDEPENDENSI DALAM ARSITEKTUR BARU

Belum terlihat arahan instrumen

Pidato menetapkan arah dan target, bukan instruksi atas BI-Rate, SRBI, ataupun intervensi. Yang bertambah adalah tuntutan agar arah kebijakan berjalan seiring.

Batas kewenangan semakin penting

Empat aktor bergerak ke satu arah. Pengamannya terletak pada hal-hal prosedural: siapa memutuskan apa, di forum mana keputusan dicatat, dan bagaimana alasannya dijelaskan.

Yang perlu dipantau

Apakah target pertumbuhan dan yield diperlakukan RDG sebagai informasi atau bergeser menjadi sasaran instrumen, dan apakah BI tetap leluasa menjelaskan perbedaan pandangan.

Sumber: Pidato RAPBN 2027 (14 Agustus 2026), Lampiran Pidato Presiden (Kementerian PPN/Bappenas), Bank Indonesia, OJK, diolah INDEF.

Koordinasi Makin Intensif, Ruang Keputusan BI Perlu Tetap Terjaga

Masukan publik dan kondisi ekonomi memberi konteks bagi kebijakan BI. Ukurannya bukan hanya pernyataan yang disampaikan, tetapi siapa yang memilih instrumen, apa alasan keputusannya, dan bagaimana keputusan itu dipertanggungjawabkan.

Pernyataan atau tekanan	Bukti yang tersedia	Respons BI yang terdokumentasi	Implikasi ekonomi	Penilaian per Agustus 2026
Presiden PTBI: sinergi, stabilitas, dan pertumbuhan	Pidato Presiden 28 Nov 2025, tema sinergi nasional	BI mempublikasikan bauran 2026: pro-stability dengan ruang pro-growth, serta KLM, sistem pembayaran, dan PUVA	Bauran 2026: BI-Rate 5,75% untuk stabilitas, KLM +Rp4,0 triliun untuk dukungan kredit	Tidak ada indikasi arahan. Bauran diumumkan melalui RDG. Yang menentukan: jejak proses pemilihan instrumen
Kebutuhan pembiayaan APBN dan pasar SBN	Realisasi utang/SBN, jadwal lelang, bid-to-cover, yield	BI membaca kondisi pasar dan menggunakan bauran operasi moneter/valas sesuai mandat	Yield SBN 10 th 7,29% (30 Jul), realisasi SBN 62,7% dari target: pasar menimbang kebutuhan pembiayaan	Masih informasi, belum target. Tidak ada dokumen yang mengaitkan biaya utang dengan keputusan instrumen
Triwulan II melambat: 5,29% vs Triwulan I 5,61%	Konsumsi 5,06%, PMTB 6,87%, pemerintah 15,97%, net ekspor -0,78 pp	BI memisahkan stabilisasi moneter dari dukungan makroprudensial, dan hasil penyaluran masih perlu dibaca	Investasi menguat (PMTB 6,87%), konsumsi melemah (5,06%), net ekspor -0,78 pp	Konteks, bukan penentu. Data pertumbuhan saja tidak cukup menentukan BI-Rate
UU 4/2026: koordinasi dan evaluasi bertambah	Pasal 9A, 43, 60, 60A memperluas titik interaksi	BI tetap menjelaskan dan memilih instrumen melalui prosedur internal	Kewenangan instrumen tetap tertulis pada BI, dengan titik rawan pada praktik evaluasi dan anggaran	Laporan evaluasi kelembagaan BI belum tersedia.
RAPBN 2027: sinergi fiskal–moneter–Danantara “semakin solid”, target tumbuh 6%	Pidato 14 Agu 2026, asumsi kurs 17.500, SBN 10 th 6,9%, inflasi 2,5%	Posisi terakhir: BI-Rate ditahan 5,75% (RDG 18–19 Agustus)	Target 6% vs Triwulan II 5,29%, asumsi yield 6,9% vs realisasi 7,29%: biaya dana diharapkan turun	Tuntutan koordinasi menguat, tetapi tidak ada arahan atas instrumen. RDG pertama setelah pidato tetap berjalan lewat prosedur BI.

Sumber: BI, Pidato RAPBN 2027, BPS, dan UU 4/2026, diolah INDEF.

IMPLIKASI

Masukan pemerintah, kebutuhan pembiayaan, dan perlambatan pertumbuhan membentuk konteks kebijakan. Itu belum cukup untuk disebut intervensi. Ukurannya lebih konkret: apakah BI tetap menentukan BI-Rate, SRBI, waktu, dan besaran responsnya, serta menjelaskan dasar keputusan tersebut.

- Alesina, A., dan L. H. Summers. (1993). Central Bank Independence and Macroeconomic Performance. *Journal of Money, Credit and Banking*, 25(2). <https://doi.org/10.2307/2077833>
- ANTARA. (2026, 18 Agustus). Ekonom: Pasar Nantikan Arah Komunikasi BI pada RDG Agustus 2026.
- Bank Indonesia. (2026). Asesmen Transparansi SBDK Juli 2026. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Documents/sp_2814226-Lampiran-3__Asesmen-Transparansi-SBDK.pdf
- Bank Indonesia. (2026). Cadangan Devisa Juli 2026. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2815126.aspx
- Bank Indonesia. (2026). Hasil Lelang SRBI 7 Agustus 2026. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/lelang/operasi-moneter/Pages/Hasil-Lelang-SRBI-7-Agustus-2026.aspx>
- Bank Indonesia. (2026, 19 Agustus). BI-Rate Tetap 5,75%: Memperkuat Stabilitas, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2816226.aspx
- Bank Indonesia. (2026). Laporan Kebijakan Moneter Triwulan II 2026. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/Laporan-Kebijakan-Moneter-Triwulan-II-2026.aspx>
- Bank Indonesia. (2026, 24 Juli). Memperkuat Stabilitas, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2814226.aspx
- Binder, C. (2021). Political Pressure on Central Banks. *Journal of Money, Credit and Banking*, 53(4). <https://doi.org/10.1111/jmcb.12739>
- BIS. (2009). Issues in the Governance of Central Banks. <https://www.bis.org/publ/othp04.htm>
- Bodea, C., dan R. Hicks. (2015). Price Stability and Central Bank Independence. *International Organization*, 69(1). <https://doi.org/10.1017/S0020818314000341>
- Bodea, C., dan M. Higashijima. (2017). Central Bank Independence and Fiscal Policy. *British Journal of Political Science*, 47(1). <https://doi.org/10.1017/S0007123415000056>
- BPS. (2026, 3 Agustus). Inflasi year-on-year pada Juli 2026 sebesar 2,88 persen. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/08/03/2601/inflasi-year-on-year--y-on-y--pada-juli-2026-sebesar-2-88-persen-.html>
- BPS. (2026, 5 Agustus). Ekonomi Indonesia Triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/08/05/2605/ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2026-tumbuh-5-29-persen--y-on-y-.html>
- Cukierman, A., S. B. Webb, dan B. Neyapti. (1992). Measuring the Independence of Central Banks and Its Effect on Policy Outcomes. *World Bank Economic Review*, 6(3). <https://doi.org/10.1093/wber/6.3.353>
- DataIndonesia.id – Bisnis Indonesia Group. (2026, 18 Agustus). BIG Consensus Insights: Proyeksi BI-Rate RDG Agustus 2026.
- Dincer, N. N., dan B. Eichengreen. (2014). Central Bank Transparency and Independence: Updates and New Measures. *International Journal of Central Banking*, 10(1). <https://www.ijcb.org/journal/ijcb14q1a6.htm>
- IMF. (2022). Central Bank Independence and Inflation in Latin America: Through the Lens of History. IMF Working Paper WP/22/186. <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2022/09/30/Central-Bank-Independence-in-Latin-America-Through-the-Lens-of-History-523900>
- Kementerian Keuangan. (2026, Juli). APBN KiTa. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/fd879869-f1e2-4475-b71f-cabff87a0c56/Publikasi-Web-Konpers-APBN-KiTa-%28Juli-2026%29.pdf>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2026). Lampiran Pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI–DPD RI Tahun 2026.
- Kirsanova, T., C. Leith, dan S. Wren-Lewis. (2009). Monetary and Fiscal Policy Interaction. *The Economic Journal*, 119(541). <https://doi.org/10.1111/j.1460-0297.2008.02236.x>
- KSSK. (2026, 3 Agustus). Rapat Berkala III 2026. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Documents/SP-Rapat-Berkala-KSSK-III-2026.pdf>
- OJK. (2026, 4 Agustus). RDKB Juli 2026: Stabilitas sektor jasa keuangan terjaga. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/RDKB-Juli-2026.aspx>
- Presiden RI. (2026, 14 Agustus). Pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI–DPD RI Tahun 2026.
- Presiden RI. (2026, 14 Agustus). Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan.
- Romelli, D. (2022). The Political Economy of Reforms in Central Bank Design. *Economic Policy*, 37(112). <https://doi.org/10.1093/epolic/eiac008>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia beserta perubahannya.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023>
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/350166>

INDEF

CENTER OF
MACROECONOMICS
AND FINANCE

INSTITUTIONAL PROFILE

ABOUT THE CENTER

MACFIN - INDEF

Center of Macroeconomics and Finance (MacFin) adalah pusat kajian di lingkungan INDEF yang menekuni isu makroekonomi, kebijakan fiskal dan moneter, serta keuangan publik Indonesia.

Melalui pemantauan data, riset, dan dialog kebijakan, MacFin membaca arah perekonomian dan menimbang konsekuensinya bagi kebijakan publik. Hasil kajiannya disampaikan kepada pengambil kebijakan, pelaku usaha, akademisi, media, dan publik luas.

Brief Update ini merupakan bagian dari seri *Macroeconomics and Finance Monitoring* yang terbit berkala.

RUANG LINGKUP KAJIAN

MAKROEKONOMI	FISKAL	MONETER	KEUANGAN PUBLIK
Perubahan ekonomi	Kebijakan pemerintah	Stabilitas dan transmisi	Pasar dan pembiayaan

www.indef.or.id

TERIMA KASIH

Center of Macroeconomics and Finance
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

